

Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang

Clara Vanencya Wogo¹, Nursalam², Made N. D. Andayana³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

clarawogo@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Kelurahan Airnona dalam pemberdayaan perempuan melalui tiga tahapan strategis, yaitu tahap penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kapasitas intelektual serta keterampilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive, terdiri dari perangkat kelurahan, kader pemberdayaan, serta perempuan pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memainkan peran penting sebagai fasilitator, pendamping, dan penghubung antara aspirasi perempuan dan kebijakan pembangunan. Upaya yang dilakukan mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan keterampilan produktif, pendampingan usaha mikro, hingga peningkatan literasi digital dan kapasitas kepemimpinan perempuan. Meskipun terdapat kemajuan, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, dan kuatnya budaya patriarkal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan perempuan perlu didukung oleh kebijakan yang inklusif, penguatan kelembagaan, dan sinergi lintas sektor agar pembangunan berbasis kesetaraan gender dapat terwujud secara berkelanjutan.

Kata Kunci: peran pemerintah, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender

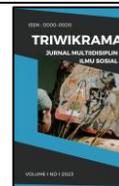
ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Airnona Village Government in empowering women through three strategic stages: awareness-raising, capacity transformation, and enhancement of intellectual and practical skills. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. Informants were selected purposively, including village officials, empowerment cadres, and women involved in micro-enterprises. The findings indicate that the village government plays a significant role as facilitator, companion, and intermediary between women's aspirations and local development policies. Efforts undertaken include awareness campaigns, vocational skill training, micro-business mentoring, as well as digital literacy programs and female leadership development. Despite these advancements, the implementation still faces challenges such as limited funding, low educational attainment among women, and strong patriarchal cultural norms. The study concludes that the active role of the village government in women's empowerment must be supported by inclusive policies, institutional strengthening, and cross-sectoral collaboration to realize sustainable gender-equitable development.

Keywords: government role, women empowerment, gender equality

*Corresponding author

E-mail addresses: clarawogo@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari peran serta semua elemen masyarakat, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting untuk mewujudkan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Namun, kenyataan sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi, baik dalam akses terhadap sumber daya, kontrol atas keputusan, maupun partisipasi dalam ruang publik. Fenomena ini berakar dari konstruksi sosial yang memosisikan perempuan sebagai pihak subordinat, yang perannya dibatasi pada ranah domestik dan dikecualikan dari proses-proses strategis pembangunan (Zakiah, 2010).

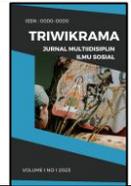
Perubahan paradigma pembangunan telah menempatkan perempuan tidak hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen serius dalam mengarusutamakan gender, antara lain melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2003), kebijakan tersebut akan efektif hanya jika diimplementasikan hingga pada level mikro, termasuk pemerintahan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Di tingkat lokal, peran pemerintah kelurahan menjadi sangat strategis dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Pemerintah kelurahan diharapkan dapat menjalankan fungsi fasilitatif, edukatif, dan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas individu dan kolektif perempuan. Sulistyani (2004) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan perempuan mencakup tiga tahap penting, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan. Ketiga tahap ini tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dan dana, tetapi juga dukungan kelembagaan yang kuat dan keberpihakan kebijakan.

Namun, dalam implementasinya, pemberdayaan perempuan di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan data demografis, dari total 8.877 jiwa penduduk di kelurahan tersebut, sekitar 4.436 jiwa adalah perempuan. Dengan proporsi yang signifikan ini, pemberdayaan perempuan seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan lokal. Sayangnya, keterbatasan anggaran, resistensi budaya patriarkal, serta regulasi teknokratis yang tidak kontekstual menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Misalnya, regulasi pengangkatan perangkat kelurahan yang mengabaikan tokoh-tokoh perempuan karismatik di masyarakat dapat berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Widjajanti, 2011).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh budaya lokal turut memengaruhi efektivitas program. Lestari dalam Wirawan (2016) menegaskan bahwa pendidikan adalah faktor krusial dalam mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara setara. Sementara itu, norma-norma budaya yang mengakar dapat membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan memperkuat stereotip domestik. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan memerlukan pendekatan intersektoral dan lintas aktor, yang tidak hanya melibatkan pemerintah kelurahan, tetapi juga organisasi masyarakat, tokoh agama, dan kelompok perempuan itu sendiri.

Bertolak dari persoalan-persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah kelurahan dalam proses pemberdayaan perempuan di Kelurahan Airnona melalui tiga pendekatan utama: tahap penyadaran dan pembentukan perilaku,



tahap transformasi kemampuan, serta tahap peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan. Dengan mengkaji peran pemerintah kelurahan dari sisi kebijakan, kelembagaan, serta respon masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi upaya pemberdayaan perempuan di tingkat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah, khususnya pada tingkat kelurahan, memiliki tanggung jawab penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Ryas Rasyid (1999), fungsi utama pemerintah daerah mencakup pelayanan, pemberdayaan, pengaturan, dan pembangunan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan, menjadi bagian integral dari pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (2009) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan. Apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi sosial yang dimiliki, maka ia telah menjalankan perannya. Dalam hal ini, peran pemerintah kelurahan ditunjukkan melalui tindakan konkret dalam mendukung akses perempuan terhadap sumber daya, pendidikan, dan partisipasi sosial-politik.

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merujuk pada proses meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan kontrol perempuan atas kehidupan mereka sendiri, baik dalam ranah domestik maupun publik. Prijono dan Pranaka (1996) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi dan kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesetaraan gender.

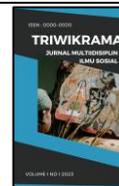
Dalam perspektif transformasi sosial, pemberdayaan perempuan tidak hanya menekankan aspek individual tetapi juga perubahan struktural di tingkat masyarakat, pasar, dan negara (Zakiyah, 2010). Strategi ini mencakup pembongkaran mitos tradisional, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pendidikan serta ruang-ruang pengambilan keputusan.

Tahapan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Sulistyani (2004), pemberdayaan perempuan terdiri dari tiga tahapan utama: (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, yaitu proses membangun kesadaran kritis perempuan terhadap posisi dan potensinya; (2) Tahap transformasi kemampuan, yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) Tahap peningkatan kapasitas intelektual dan inovasi, yakni pencapaian kemandirian melalui penguatan daya cipta dan inisiatif dalam kegiatan ekonomi maupun sosial.

Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui berbagai indikator. Suharto (2003) menyebutkan lima indikator utama, yaitu: (1) ketersediaan sarana pendidikan yang memadai bagi perempuan; (2) peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif; (3) meningkatnya jumlah perempuan di pendidikan tinggi; (4) keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif; dan (5) aktifnya perempuan dalam kampanye-kampanye sosial.



Indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemberdayaan telah menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan perempuan.

Faktor Penghambat Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan kerap menghadapi tantangan, baik dari aspek struktural maupun kultural. Tingkat pendidikan yang rendah, norma adat yang patriarkal, dan minimnya anggaran pemberdayaan merupakan faktor penghambat utama. Lestari dalam Wirawan (2016) menyatakan bahwa rendahnya pendidikan perempuan berdampak pada rendahnya pengetahuan, keterampilan, serta partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, budaya lokal yang masih memosisikan perempuan dalam ranah domestik turut menghambat keterlibatan aktif mereka di ruang publik (Parsudi Suparlan, 1984).

2. METODE

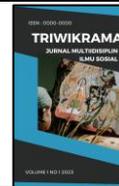
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peran pemerintah kelurahan dalam proses pemberdayaan perempuan di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu mengungkap makna, pemahaman, serta pengalaman sosial dari para pelaku secara holistik dalam konteks kehidupan nyata mereka (Moleong, 2017). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan informan dan lingkungan sosialnya secara alami tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Airnona, dengan fokus pada tiga tahapan utama dalam pemberdayaan perempuan, yakni: tahap kesadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan. Tiga tahapan ini mengacu pada model pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004), yang menekankan pentingnya proses bertahap dalam membangun kesadaran kritis, kemampuan, dan kemandirian perempuan agar mereka mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dinilai paling mengetahui dan memahami konteks penelitian. Informan terdiri dari unsur pemerintah kelurahan seperti lurah, sekretaris, kepala seksi, serta tokoh perempuan dari PKK, kader pemberdayaan, dan perempuan pelaku usaha mikro. Total informan berjumlah 11 orang. Teknik ini dianggap sesuai dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi, bukan pada jumlah representatif populasi (Sugiyono, 2019).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan terkait aktivitas pemberdayaan perempuan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran, tantangan, dan strategi pemerintah kelurahan dalam memberdayakan perempuan. Sedangkan dokumentasi dilakukan melalui telaah terhadap dokumen seperti laporan kegiatan, arsip kelurahan, serta data demografi yang relevan dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari pola dan makna yang muncul dari hasil temuan lapangan.



Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Selain itu, dilakukan juga member checking dengan mengonfirmasi ulang hasil wawancara kepada informan untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Validitas dalam penelitian kualitatif tidak dilihat dari generalisasi, melainkan dari kekuatan argumentasi data yang didukung oleh interaksi peneliti dengan realitas sosial yang diteliti (Creswell, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Airnona dalam pemberdayaan perempuan direalisasikan melalui tahapan strategis yang sesuai dengan model pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004), yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kapasitas intelektual serta keterampilan. Ketiga tahap ini menjadi kerangka konseptual dalam menganalisis sejauh mana keterlibatan pemerintah kelurahan dalam mendorong perempuan menjadi subjek aktif pembangunan di lingkup masyarakatnya. Dalam praktiknya, pemerintah kelurahan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan jembatan antara aspirasi perempuan dengan kebijakan pembangunan lokal. Dengan memahami peran strategis ini, pemerintah kelurahan mampu memainkan fungsi pelayanan publik secara lebih transformatif, sebagaimana ditegaskan oleh Rasyid (1999) bahwa otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah tingkat bawah untuk mendorong partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Pada tahap penyadaran, pemerintah kelurahan menunjukkan upaya sistematis dalam membangun kesadaran kritis perempuan melalui berbagai forum informal maupun kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan seperti PKK, kelompok dasawisma, dan kegiatan Posyandu. Tujuannya adalah untuk menggugah pemahaman perempuan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan kelurahan. Menurut Zakiyah (2010), pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran individu terhadap potensi dan hak-haknya, yang kemudian mendorong partisipasi aktif dalam ruang publik. Kesadaran ini dibentuk melalui kegiatan penyuluhan, diskusi kelompok, dan dialog warga yang dipandu oleh perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat. Beberapa program seperti sosialisasi program keluarga, peningkatan gizi balita, hingga pelatihan pengasuhan anak, bukan hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup keluarga tetapi juga menjadi media pendidikan sosial bagi perempuan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan warga seperti kerja bakti, musyawarah RT/RW, dan pelatihan keluarga sehat. Keterlibatan ini bukan hanya menunjukkan peningkatan kesadaran akan peran sosial perempuan, tetapi juga menjadi awal terbentuknya jejaring sosial yang memperkuat solidaritas dan kepercayaan diri kolektif.

Tahap transformasi kemampuan menjadi tahapan penting berikutnya dalam proses pemberdayaan perempuan. Pada tahap ini, peran pemerintah kelurahan diwujudkan secara lebih konkret dalam bentuk pelaksanaan program pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha ekonomi produktif. Program-program yang dikembangkan meliputi pelatihan menjahit, kuliner rumah tangga, kerajinan tangan berbasis bahan lokal, serta manajemen keuangan mikro. Program ini ditujukan terutama bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah dan perempuan kepala keluarga. Sebagaimana ditegaskan oleh Prijono dan Pranaka (1996), pemberdayaan sejatinya bukan hanya menyediakan akses terhadap sumber daya, melainkan juga meningkatkan kapabilitas

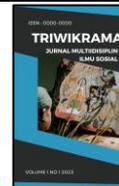


individu dan kelompok agar mampu memanfaatkan peluang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah kelurahan juga menjalin kerja sama dengan koperasi, LSM lokal, serta dinas terkait di tingkat kota untuk membuka akses pelatihan, pemasaran produk, hingga bantuan permodalan usaha mikro. Perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha binaan mendapatkan dukungan tidak hanya dalam bentuk pelatihan teknis, tetapi juga pembentukan kelembagaan seperti koperasi wanita dan kelompok simpan-pinjam, yang bertujuan memperkuat keberlanjutan usaha dan solidaritas ekonomi perempuan. Selain itu, kegiatan seperti arisan, pengajian, dan pelatihan parenting tidak hanya berfungsi sosial, tetapi juga menjadi sarana informal penguatan kapasitas, sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid (1999), bahwa pembinaan kelembagaan lokal merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan berbasis masyarakat.

Tahap terakhir dalam model pemberdayaan ini adalah peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan yang lebih maju. Pada tahap ini, perempuan yang telah memiliki kesadaran dan keterampilan dasar difasilitasi untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Pemerintah kelurahan memfasilitasi pelatihan literasi digital, pelatihan penyusunan proposal usaha, pengenalan hukum keluarga dan perlindungan anak, hingga pelatihan advokasi berbasis komunitas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah perempuan yang sebelumnya hanya menjalankan peran domestik, kini aktif sebagai pengurus RT, anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), bahkan terlibat dalam forum musyawarah kelurahan untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan pembangunan. Ini menjadi indikator bahwa proses pemberdayaan tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup transformasi peran sosial dan politik perempuan dalam masyarakat. Menurut Suharto (2003), keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan, kontrol atas sumber daya, serta kemampuan mengorganisasi diri dalam struktur sosial yang lebih luas.

Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam implementasi program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Airnona. Faktor internal yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian besar perempuan, yang menyebabkan keterbatasan pemahaman terhadap konsep pemberdayaan, akses teknologi informasi, dan strategi pengembangan usaha. Lestari dalam Wirawan (2016) menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membentuk individu yang kritis, adaptif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Selain itu, faktor kultural seperti dominasi nilai-nilai patriarkal dalam lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Perempuan sering kali masih diposisikan sebagai pelengkap peran laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan keluarga dan komunitas. Hal ini diperburuk oleh kurangnya perspektif gender dalam diri sebagian aparat pemerintah kelurahan maupun tokoh masyarakat, yang menyebabkan bias dalam distribusi peran dan akses terhadap program-program strategis. Widjajanti (2011) menyebutkan bahwa tanpa perspektif gender yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka pemberdayaan hanya akan menjadi jargon formal tanpa dampak substantif.

Aspek struktural lainnya yang menjadi kendala adalah keterbatasan alokasi anggaran kelurahan untuk program pemberdayaan. Sebagian besar anggaran difokuskan pada infrastruktur fisik dan layanan dasar, sementara kegiatan sosial-kultural yang bersifat transformatif seperti pelatihan perempuan, penguatan lembaga perempuan, dan kampanye kesetaraan gender masih belum mendapatkan prioritas. Dalam beberapa kasus, keberlanjutan program bergantung pada inisiatif individu atau kelompok, bukan pada sistem kelembagaan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan multisektor dalam pemberdayaan perempuan, di mana peran pemerintah kota, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan tokoh agama perlu disinergikan dalam kerangka kebijakan pembangunan inklusif.



Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pemerintah Kelurahan Airnona telah memainkan peran penting dalam proses pemberdayaan perempuan melalui pendekatan edukatif, produktif, dan partisipatif. Ketiga tahap pemberdayaan yang telah dijalankan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan peran sosial dan ekonomi perempuan, serta mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih komprehensif, pemberdayaan perempuan tidak dapat dipandang sebagai program tambahan atau sektoral, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam perspektif gender, serta penguatan kelembagaan perempuan sebagai motor penggerak perubahan sosial. Pemberdayaan yang sesungguhnya adalah ketika perempuan tidak hanya mendapatkan manfaat dari pembangunan, tetapi juga memiliki kuasa untuk memengaruhi arah dan tujuan pembangunan itu sendiri.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Airnona telah memainkan peran yang cukup penting dalam proses pemberdayaan perempuan melalui pendekatan bertahap yang meliputi tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, serta tahap peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan. Peran tersebut diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan administratif, tetapi juga melalui peran strategis sebagai fasilitator, pendamping, dan penggerak dalam berbagai program yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kemandirian perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat.

Pada tahap penyadaran, pemerintah kelurahan berhasil membangun kesadaran kritis perempuan terhadap hak dan potensi mereka melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan organisasi perempuan. Pada tahap transformasi kemampuan, peran pemerintah tercermin dari berbagai pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap usaha ekonomi produktif berbasis rumah tangga. Sedangkan pada tahap peningkatan kapasitas intelektual, perempuan mulai menunjukkan peran aktif dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat lokal, serta berani mengelola usaha dan mengakses berbagai program pemberdayaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program pemberdayaan dihadapkan pada sejumlah kendala, baik dari aspek internal seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan literasi perempuan, maupun dari aspek eksternal seperti budaya patriarkal, kurangnya perspektif gender dalam kelembagaan lokal, serta keterbatasan anggaran program. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan yang dilakukan perlu didukung oleh pendekatan yang lebih menyeluruh, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Saran

1. Pemerintah Kelurahan Airnona perlu meningkatkan alokasi dan efisiensi anggaran untuk program-program pemberdayaan perempuan, serta mengintegrasikan kegiatan tersebut dalam rencana pembangunan jangka menengah kelurahan secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Penguatan kapasitas aparatur kelurahan dalam hal perspektif gender menjadi penting agar pelaksanaan program tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu menyentuh substansi



kesetaraan dan keadilan gender. Pelatihan gender dan inklusi sosial bagi aparaturnya dan tokoh masyarakat perlu diprioritaskan.

3. Kemitraan dengan lembaga eksternal seperti LSM, koperasi, dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan guna mendukung perluasan akses pelatihan, pendampingan usaha, serta pemberian modal usaha bagi perempuan, terutama yang berada pada kelompok rentan ekonomi.
4. Perempuan di Kelurahan Airnona diharapkan dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang pemberdayaan yang tersedia, memperkuat solidaritas sosial melalui kelompok atau komunitas perempuan, serta terus mengembangkan kapasitas pribadi dalam aspek ekonomi, sosial, dan kepemimpinan.
5. Pemerintah daerah (kota maupun provinsi) diharapkan memberikan dukungan regulatif dan programatik terhadap inisiatif pemberdayaan yang dilakukan di tingkat kelurahan, termasuk mengarahkan kebijakan pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap isu gender dan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemberdayaan perempuan di tingkat kelurahan dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

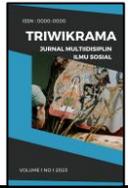
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lestari, N. (2016). Pendidikan perempuan sebagai strategi pemberdayaan: Telaah dalam konteks pembangunan. Dalam I. B. Wirawan, *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi dan profesi evaluasi* (hlm. 177-196). Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prijono, O. S., & Pranaka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rasyid, R. (1999). *Makna pemerintahan daerah: Dari otonomi daerah ke pemerintah daerah otonom*. Yogyakarta: Ull Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjajanti, K. R. (2011). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif perencanaan partisipatif*. Jakarta: LP3ES.
- Zakiah, Z. Q. (2010). *Gender dalam perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 9, Number 11 2025

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



*Corresponding author
E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com